

# Pengembangan Kepemimpinan Kepala & Staf Dinas Kesehatan Serta Kementerian Kesehatan

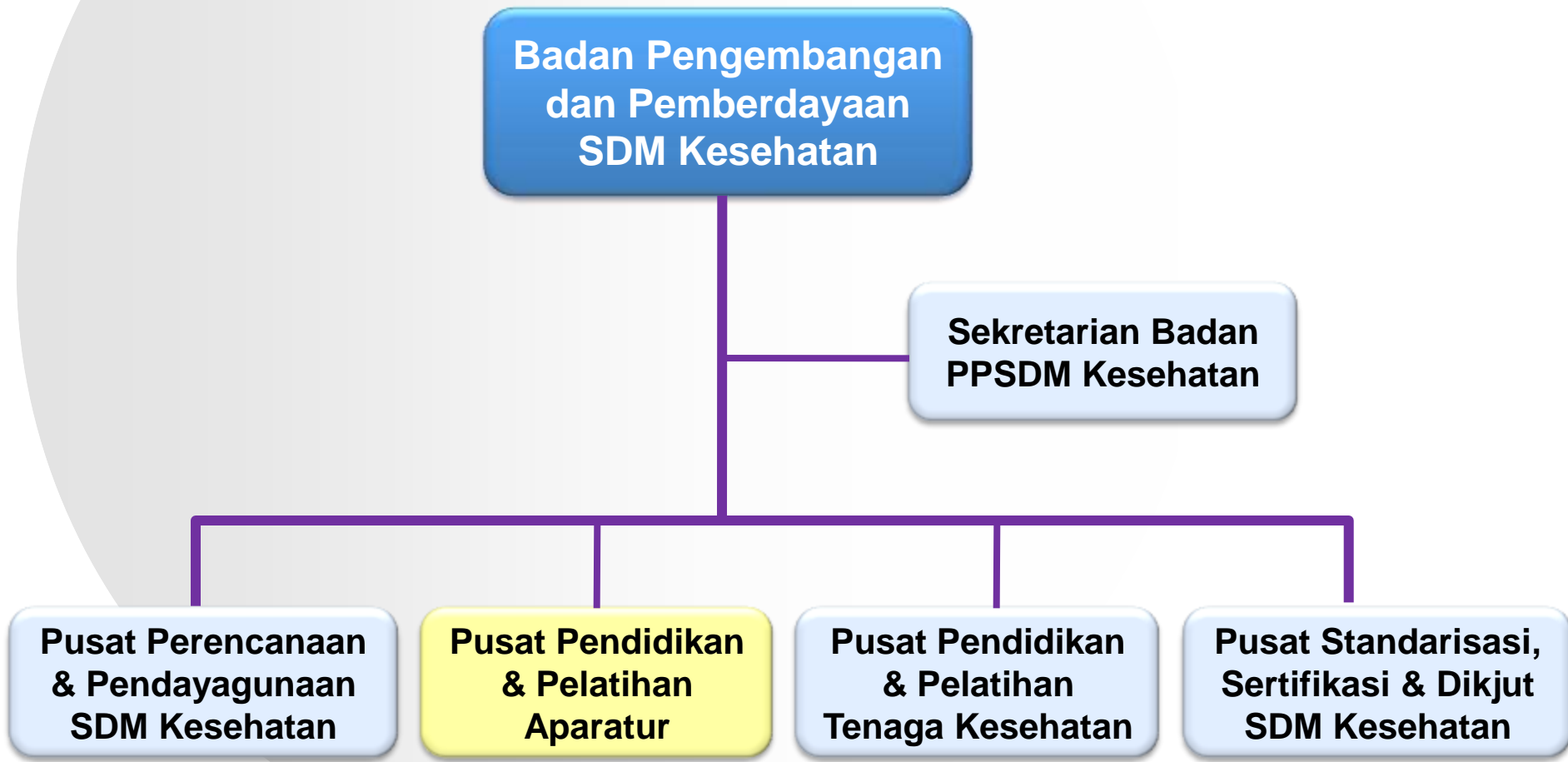


Oleh: Sulistiono

Kepala Pusdiklat Aparatur Badan PPSDM Kemenkes



# **STRUKTUR ORGANISASI BADAN PPSDM KES KEMENTERIAN KESEHATAN RI (PERMENKES Nomor 1144 th. 2010)**



# Jabatan



Persyaratan Jabatan

## Jabatan Struktural

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang & hak seorang pegawai dlm rangka memimpin suatu satuan organisasi

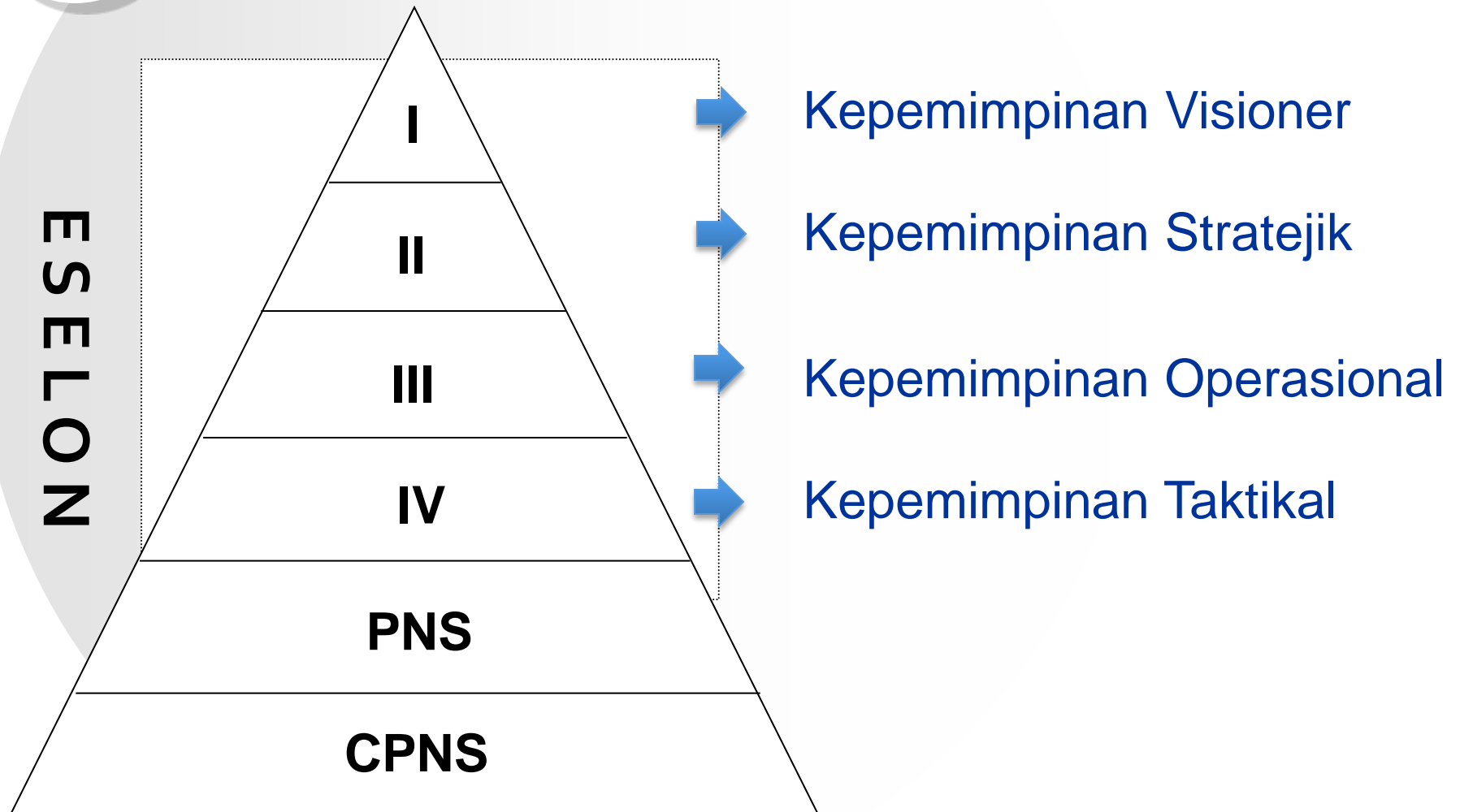
## Jabatan Struktural Kesehatan :

1. Membutuhkan tingkat kompetensi yang tinggi
2. Merupakan pelayanan yang padat teknologi dan profesi
3. Kompetensi dasar, bidang dan khusus

Berdasarkan prinsip Prof. & Kompetensi

# Titik Berat Ideal


## Kompetensi Kepemimpinan





# Permenkes No. 971 th 2009

## Bab I, Pasal 1, Ayat 3



Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.



# Kompetensi yg hrs dimiliki

**Permenkes No. 971 th 2009**

Kompetensi Dasar

Kompetensi Bidang

Kompetensi Khusus



**Pejabat  
Struktural**



# Kompetensi Dasar

Kompetensi yg wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural

- ⦿ Integritas
- ⦿ Kepemimpinan
- ⦿ Perencanaan
- ⦿ Penganggaran
- ⦿ Pengorganisasian
- ⦿ Kerjasama, dan
- ⦿ Fleksibel



# Kompetensi Bidang

Kompetensi yg diperlukan oleh setiap pejabat Struktural sesuai dgn bidang pekerjaan yg menjadi tanggung jawabnya

- ⦿ orientasi pada pelayanan
- ⦿ orientasi pada kualitas
- ⦿ berpikir analitis
- ⦿ berpikir konseptual
- ⦿ keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional;
- ⦿ inovasi





# Kompetensi Khusus

Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya

- ⦿ Pendidikan
- ⦿ Pelatihan
- ⦿ Pengalaman jabatan



# KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DINKES PROP/KAB/KOTA

JABATAN	PENDIDIKAN	PELATIHAN	PENGALAMAN
Ka. Dinles dan Ses. Dinkes	Minimal S2 Kesmas dgn pendidikan dasar : S1 Kes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepemimpinan</li><li>• Rencana Strategis</li><li>• Sistem Manajemen Informasi Kes</li><li>• Pengembangan Komunitas, Surveilans, Epidemiologi, dan Manajemen Bencana,</li><li>• Early Warning Outbreak Recognition System (EWORS).</li><li>• <u>dipenuhi sebelum atau paling lama 1 th stlh menduduki jabatan</u></li></ul>	minimal 3 th sbg Ka. Bid di Dinkes Prop/ Kab/Kota atau Ka.Dinkes Prop/ Kab/Kota



## KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DINKES PROP/KAB/KOTA

JABATAN	PENDIDIKAN	PELATIHAN
Ka. Bid/ Ka. Bag	Minimal S1 Kes	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Sesuai bidang tugasnya</u></li><li>• <u>dipenuhi sebelum atau paling lama 1 th setelah menduduki jabatan</u></li></ul>
Ka. Sie/ Ka. Subbag	Minimal S1 Kes	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Sesuai bidang tugasnya</u></li><li>• <u>dipenuhi sebelum atau paling lama 1 th setelah menduduki jabatan</u></li></ul>



# Kebijakan Diklat Aparatur

- ⦿ Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur kesehatan yang kompeten
- ⦿ Dilaksanakan secara berjenjang dan berlanjut
- ⦿ Merupakan bagian integral dari pembinaan dan pengembangan karir aparatur kesehatan.
- ⦿ Didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan
- ⦿ Menggunakan metodologi dan teknologi diklat yang inovatif, kreatif dan tepat guna
- ⦿ Menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan.
- ⦿ Dilaksanakan melalui peningkatan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan
- ⦿ Peningkatan mutu dilaksanakan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan termasuk peningkatan SDM pelatihan aparatur kesehatan.



## Strategi Pengembangan Pelatihan Bagi Pejabat Struktural Kesehatan

1. Diklat teknis kepemimpinan kesehatan dikembangkan mengacu pada Permenkes 971 tahun 2009 untuk memenuhi kompetensi khusus yang dipersyaratkan dengan memperhatikan kompetensi dasar dan bidang serta diklat PIM yang sudah ada
2. Pengembangan diklat dilaksanakan dengan menggalang kemitraan dengan instansi terkait mulai dari TNA, penyusunan kurikulum dan modul sampai dengan penyelenggaraannya



## Strategi Pengembangan Pelatihan Bagi Pejabat Struktural Kesehatan

### 3. Penyelenggaraan Pelatihan

#### a. Pendekatan pelatihan

- Klasikal
- Open Learning

#### b. Kurikulum pelatihan

- Menggunakan kurikulum dan modul yang sudah distandarisasi oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan usulan dari Pusdiklat Aparatur

#### c. Penyelenggara pelatihan adalah institusi diklat yang terakreditasi baik oleh LAN maupun Pusdiklat Aparatur

- (Pusdiklat Aparatur, BBPK, Bapelkes Nasional, Bapelkes Daerah, Badan Diklat Propinsi, Badan Diklat Kab/Kota)



## Strategi Pengembangan Pelatihan Bagi Pejabat Struktural Kesehatan



4. Pengendalian mutu pelatihan dilaksanakan melalui:
  - a. Akreditasi pelatihan oleh Pusdiklat Aparatur dan Tim akreditasi propinsi
  - b. Quality Control (QC) pelatihan oleh Tim Pusat dan Propinsi
    - Tim Pusat terdiri dari Pusdiklat Aparatur, BBPK dan bapelkesnas
    - Tim Propinsi → tim akreditasi propinsi yang terdiri dari Dinkes Propinsi dan Bapelkes Daerah
    - Menggunakan instrumen yang sama dalam melaksanakan quality control pelatihan



# Tahapan Pengembangan Pelatihan

TNA

Lokakarya

Penyusunan Kurikulum & Modul

Uji Coba Pelatihan

Standarisasi Kurikulum & Pelatihan

TOT

Penyelenggaraan Pelatihan





## Pelatihan yg akan dikembangkan

1. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural RS
2. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural Dinas Kesehatan
3. Pelatihan Bagi Kepala Puskesmas
4. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural UPT/UPTD
  - a. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural Poltekkes
  - b. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural BBPK/Bapelkes
  - c. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural KKP
  - d. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural BTKL
  - e. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural BBLK/BLK



# Pengembangan Pelatihan bagi Kepala Dinas Kesehatan

## Pendekatan Pelatihan

1. Pelatihan Klasikal ( 8 hari)
2. Pelatihan Rintisan Open Learning



# Pelatihan Rintisan Open Learning

1. Tahapan pembelajaran
  - a. Belajar mandiri dengan tutorial berbasis web (1 bulan)
  - b. Internalisasi/pendalaman di dalam kelas (3 hari)  
→ pre test di awal pendalaman
  - c. Aplikasi di lapangan dengan fasilitasi/tutorial berbasis web (1,5 bulan)
  - d. Seminar hasil implementasi (2 hari)



# Peserta

- a. Kriteria Peserta
  - Kepala Dinas
  - Memiliki akses internet
  - Memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer dan internet
  - Memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal pasif
- b. Peserta berjumlah 30 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota yang maju dengan kriteria sbb:
  - tidak masuk dalam DBK
  - kapasitas fiskal cukup
  - ada kemudahan akses internet
- c. Propinsi target: DI Jogjakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Bali
- d. Setiap propinsi ada satu Kepala Dinas Propinsi yang akan hadir dalam internalisasi/pendalaman dan seminar hasil.



# Mekanisme Penyelenggaraan

## **a. Institusi Penyelenggara**

### **1) TOT**

- **Pusdiklat Aparatur**
- **BBPK**

### **2) Pelatihan bagi Ka. Dinkes**

- **BBPK**
  - **Bapelkes**
  - **Bapelkes Propinsi**
- Institusi diklat kesehatan yang terakreditasi**



## Rekrutmen: (klasikal & rintisan)

- Undangan dari Kemendagri (cq Ditjen Otoda kepada Bupati/Walikota dengan cc Gubernur)
- Usulan calon peserta disampaikan oleh Bupati/walikota kepada Ditjen Otoda dengan cc gubernur dan Ka. Badan PPSDM Kesehatan)
- Seleksi calon peserta dilakukan oleh tim yang terdiri dari Ditjen Otoda, Badan Diklat Kemendagri dan Badan PPSDM Kes
- Nama-nama calon peserta yang lulus seleksi disampaikan oleh Ditjen Otoda kepada Badan PPSDM
- Penetapan peserta oleh Ka. Badan PPSDM Kesehatan
- Pemanggilan peserta oleh Otoda Kemendagri



## 4. Tim Pelatihan

### a. Fasilitator

- Menguasai substansi
- Sudah mengikuti TOT
- Widyaiswara
- Pejabat struktural sejenis minimal setingkat
- Pernah menduduki jabatan struktural sejenis minimal setingkat
- Dosen Poltekkes dan PT



# TUTOR

- Menguasai seluruh substansi
- Memiliki akses internet
- Menguasai internet
- Widyaiswara
- Pejabat struktural sejenis minimal setingkat
- Pernah menduduki jabatan struktural sejenis minimal setingkat
- Dosen Poltekkes dan PT





c. Nara sumber

Bertugas untuk menjawab pertanyaan(bisa dari tutor atau fasilitator)

d. Sekretaris

berfungsi untuk memonitor seluruh kegiatan dari awal hingga akhir pelatihan

e. Admin

mamantau/monitoring lalu lintas web site



# Materi Pelatihan Bagi Ka Dinkes

KOMPETENSI	MATERI
I. Kebijakan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan Kesehatan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kebijakan pembangunan kesehatan nasional</li><li>b. Good Governance</li><li>c. IHR</li></ol></li><li>2. Reformasi Sistem Kesehatan yang berkelanjutan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Equity/pemerataan dalam Kesehatan</li><li>b. Kemitraan antara swasta dan pemerintah.</li><li>c. Desentralisasi Kesehatan</li><li>d. Reformasi birokrasi</li></ol></li></ol>
II. Kemampuan personal manajerial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemampuan komunikasi dan menyampaikan pendapat<ol style="list-style-type: none"><li>a. Teknik Presentasi</li><li>b. <i>Public Speaking</i></li></ol></li></ol>



# Materi Pelatihan Bagi Ka Dinkes

Kompetensi	Materi
II. Kemampuan personal manajerial	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Kemampuan kepemimpinan dan bekerjasama<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membangun kepercayaan organisasi</li><li>b. Pengelolaan tugas</li><li>c. Pengendalian rapat</li><li>d. Bekerja dalam tekanan</li><li>e. Komunikasi efektif dan interpersonal</li><li>f. Memimpin orang lain dan motivasi staf</li><li>g. Inovasi</li><li>h. Manajemen risiko</li></ol></li> <li>3. Kemampuan lobby dan negosiasi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Advokasi</li><li>b. Negosiasi</li></ol></li> <li>4. Pengembangan Jejaring</li></ol>



# Materi Pelatihan Bagi Ka Dinkes

Kompetensi	Materi
III. Manajemen Kesehatan dan penyusunan Master Plan & Renstra Strategis Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Manajemen informasi kesehatan</li><li>2. <i>Event based surveillance</i></li><li>3. Prediksi/proyeksi data</li><li>4. Manajerial epidemiologi</li><li>5. Penyusunan Indikator Kinerja SPM Dinkes</li><li>6. Pengelolaan Sumber Daya dan manajemen Logistik di Dinkes</li><li>7. Problem Solving</li><li>8. Anggaran Dinkes 2010</li><li>9. Ekonomi Kesehatan</li><li>10. Penghitungan Kebutuhan SDM Dinkes</li><li>11. Pencegahan dan Pengelolaan akibat bencana</li></ol>



# PEMBIAYAAN

- ❖ Sebaiknya dari Kemenkes melalui Badan PPSDM Kesehatan
- ❖ Namun tetap perlu diidentifikasi pembiayaan yang melibatkan pemda
- ❖ Jika melibatkan pembiayaan dari pemda maka lakukan penganggaran diklat sesuai dengan urusan pemerintahan.

## Catatan :

**Dalam PP 38/07 diklat yang diselenggarakan oleh provinsi adalah diklat fungsional sedangkan kab/kota adalah teknis artinya utk diklat struktural hanya boleh dilakukan oleh pemerintah pusat. Apakah sharing pembiayaan pelaksanaan diklat tidak dimungkinkan dibebankan kedalam APBD....??????**



# Terimakasih!